

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi dan peran yang penting pada perekonomian di hampir setiap negara, termasuk di Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup> Dalam kegiatan usaha, Gerakan sektor usaha mikro, kecil dan menengah amat vital dalam menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha besar. Usaha mikro, kecil dan menengah juga cukup terdiversifikasi serta memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan sehingga menjadi salah satu penyokong devisa negara walaupun kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi usaha besar.<sup>2</sup>

Kontribusi sektor UMKM yang lebih besar dibandingkan sektor usaha besar ini, juga didukung dengan jumlah UMKM yang terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data terakhir yang ditemukan, jumlah UMKM pada tahun 2019 mencapai angka 65,465,497 UMKM (KEMENKOP UKM, 2019). Besarnya

---

<sup>1</sup> DPR Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<sup>2</sup>Nungki Viana Feranita dan Hendra Aris Setiawan, "Peran Keunggulan Bersaing Dalam Memediasi Dampak Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja UMKM", (Jember: Jurnal Majalah Ilmiah Dian Ilmu, 2018), Vol. 18, No. 1, hlm. 55.

jumlah UMKM di Indonesia ini seakan memberi angin segar dalam pembangunan ekonomi nasional, mengingat UMKM setidaknya berhasil menyumbangkan 60,51% PDB dan mampu menyerap tenaga pekerjaan sebanyak 96,92%. Persentase tersebut tentu bukan angka yang kecil untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia

**Gambar 1.1**  
**Gambaran UMKM di Indonesia 2020**



Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Melihat besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saling bekerjasama dalam memberdayakan UMKM untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sendiri, mayoritas pemilik usaha mikro adalah orang miskin dan berpenghasilan rendah. Mereka menjalankan usaha tanpa dukungan modal yang memadai, sehingga sangat terbatas dalam mengembangkan usahanya. Kondisi ini mengakibatkan UMKM sulit berinovasi, meningkatkan kualitas produk, maupun memperluas pasar. Sedangkan untuk usaha kecil dan menengah, mereka hanya

menjadi buruh atau pekerja dengan upah standar, alih-alih pemilik usaha<sup>3</sup>. Usaha mikro dianggap mudah untuk dijalankan siapa saja tanpa membutuhkan kemampuan khusus. Namun, untuk bertahan dan berkembang usaha ini sama dengan usaha kecil dan menengah, memerlukan strategi yang cocok dan tidak semua pelaku usaha mengetahuinya. Dengan jumlah UMKM yang semakin meningkat setiap tahunnya mendatangkan persaingan yang semakin sengit. Terlebih, UMKM di negara ini masih didominasi dengan produk yang berkualitas rendah karena mengandalkan produksi secara manual dan penggunaan teknologi yang lebih sedikit. Akhirnya, produk yang dihasilkan cenderung berkualitas rendah dan sulit bersaing dengan produk dari pelaku usaha yang lebih maju atau dengan produk impor. Hal ini juga dilatarbelakangi dengan keterbatasan modal yang dimiliki. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, berdasarkan data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari total UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Hal ini memperburuk situasi, karena modal sangat penting untuk ekspansi usaha dan investasi teknologi. Tanpa permodalan yang cukup, UMKM sulit untuk melakukan peningkatan kapasitas produk dan daya saing.

Kelemahan internal dan gangguan di tengah ketidakpastian membuat UMKM tidak mampu membangun keberlanjutan usaha secara mandiri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nursini, "Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia", (Makassar: Development Studies Research, 2020), Vol. 7, No. 1, hlm. 154.

<sup>4</sup> Syamsari, Muhammad Ramaditya, Irma Adriani, dan Ayu Puspitasari, "Selecting Priority Policy Strategies for Sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises in Takalar Regency", (Switzerland: MDPI, *Journal Sustainability*, 2022), Vol. 14, No. 23, hlm. 1.

Kerentanan UMKM terhadap berbagai gangguan, baik internal seperti manajemen yang lemah, maupun eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, menyebabkan banyak UMKM gagal bertahan dan tidak mampu membangun usaha yang berkelanjutan secara mandiri. Permasalahan-permasalahan ini tentu memerlukan peran pemerintah sebagai *stakeholders* untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan kelas UMKM, sehingga dapat terus bersinergi dan berkontribusi membangun ekonomi nasional. Sebagai penyelenggara pemerintah yang otonom, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam upaya memberdayakan UMKM dengan membuat berbagai kebijakan yang terarah dan berkesinambungan. Kebijakan ini tentunya berisi perkiraan sebagai antisipasi kemungkinan gangguan di masa depan dan mendorong pertumbuhan usaha yang kuat dalam menghadapi tekanan. UMKM harus selalu siap untuk mengatasi situasi yang lebih kritis, agar dapat bangkit dari kegagalan, dan mengembangkan usahanya.

Pemerintah provinsi Daerah Khusus Jakarta bertekad mengembangkan sektor UMKM dengan mengamanatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) yang berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diharapkan dapat memberikan pemberdayaan bagi UMKM Jakarta.<sup>5</sup> Dalam menjalankan tugasnya, Dinas PPKUKM merancang sebuah program pemberdayaan UMKM yang disebut Jakarta *Entrepreneur* (Jak Preneur).

---

<sup>5</sup>Ainaa Maulidya Zahra dan Novie Indrawati Sagita, “Efektivitas Program Jakarta *Entrepreneur* (Jak Preneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara”, (Kendari: Neo Respublica, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2023), Vol. 5, No. 1, hlm. 261.

*Jak* yang berasal dari kata Jakarta dan *Preneur* yang berarti *Entrepreneur*, merupakan platform kreasi, fasilitasi, kolaborasi dengan ekosistem kewirausahaan dan diperuntukan untuk masyarakat Jakarta. Sebelumnya, *Jak Preneur* merupakan program lanjutan atau pengganti dari *One Kecamatan One Center for Entrepreneurship* (OK OCE), sebuah program yang dicanangkan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan pada tahun 2020.<sup>6</sup> Pergantian nama OK OCE menjadi *Jak Preneur* juga diharapkan membawa citra baru yang lebih baik kedepannya.

Dalam kebijakan program *Jak Preneur* terdapat 7 kegiatan yang dapat diikuti pelaku UMKM dalam upaya mencapai kemandirian, yang diantaranya; Pendaftaran Binaan, pelatihan, pemasaran, perizinan, permodalan, laporan keuangan, dan pendampingan. Kegiatan-kegiatan ini dirancang secara praktis agar dapat dilakukan dengan mudah. Seperti contohnya dalam melakukan pelatihan, binaan dapat mengikuti pelatihan kapanpun dan dimanapun dengan mengikuti kelas secara online, atau dapat mengakses video-video di laman website *Jak Preneur*. Para peserta binaan akan selalu didampingi oleh pendamping profesional yang selain mendampingi juga memberikan konsultasi terhadap usaha yang akan atau sedang dijalankan. Namun, banyaknya manfaat yang ditawarkan melalui program *Jak Preneur* ini, faktanya tidak tersampaikan secara luas kepada masyarakat Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari jumlah UMKM Binaan *Jak Preneur* yang jauh lebih sedikit dari jumlah keseluruhan UMKM di Jakarta.

---

<sup>6</sup>Ibid., hlm. 262

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMKM di Jakarta 2022**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
Kepulauan Seribu	3735	0.32
Jakarta Selatan	224245	19.48
Jakarta Timur	252953	21.98
Jakarta Pusat	147745	12.84
Jakarta Barat	305076	26.50
Jakarta Utara	217326	18.88
<b>Total</b>	<b>1151080</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah UMKM di kota Jakarta Barat menempati posisi tertinggi di DKI Jakarta yang kemudian disusul oleh kota Jakarta Timur. Tumbuh pesatnya UMKM di kedua wilayah tersebut tentu didukung oleh aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai. Seperti Jakarta Barat yang kini telah tumbuh menjadi area yang sangat strategis, dengan berkembangnya pusat industri dan perdagangan yang kuat, wilayah ini berhasil menarik banyak pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Begitu pula dengan Jakarta Timur, wilayah ini terus menunjukkan perkembangan pesat. Baik dari segi pemukiman maupun industri, pertumbuhan ini kemudian menciptakan ruang yang luas bagi usaha mikro dan kecil (UMK) untuk beroperasi dan berkembang. Namun, besarnya jumlah UMKM di DKI tidak sebanding dengan jumlah yang terdaftar dalam program Jak Preneur. Berdasarkan laman website Jak Preneur, jumlah peserta binaan yang telah mendaftar pada program

unggulan UMKM DKI ini berjumlah 376.731 UMKM. Jumlah ini belum mencapai setengah dari jumlah UMKM di DKI yang telah mencapai 1.151.080 UMKM yang tersebar di enam kabupaten/kota Jakarta. Perbandingan yang sangat jauh ini merupakan salah satu kekurangan dari jalannya program Jak Preneur. Hal ini didukung dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan jika program Jak Preneur hanya menjangkau beberapa UMKM di setiap kecamatan.<sup>7</sup> Sedangkan berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis, masih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui adanya program Jak Preneur yang berada di kecamatan. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program pemberdayaan UMKM ini dapat dilatarbelakangi oleh kurangnya koordinasi kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mensosialisasikan program, pada akhirnya masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran akan adanya program, sehingga berakibat pada kurangnya partisipasi dan kesuksesan program.<sup>8</sup>

Seperti slogan yang selalu digaungkan Jak Preneur, “UMKM naik kelas”. Dalam jalannya program, peserta binaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu binaan yang tidak berhasil naik kelas, dan binaan yang berhasil naik kelas. Ada beberapa hambatan yang biasa dialami peserta program pemberdayaan UMKM, hambatan ini dapat meliputi; SDM yang tidak kompeten, manajemen yang kurang profesional, kurangnya sosialisasi dan komunikasi, keterbatasan modal, kualitas produk yang tidak memenuhi persyaratan, ketidaksesuaian harga, dan kemasan

---

<sup>7</sup> Anna Elisabeth Panjaitan, dkk, *The Implementation of Jakarta Entrepreneurship (Jak Preneur) Program in Empowering Small and Medium Enterprises in Kembangan District Administrative City of West Jakarta*, (Jakarta : Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship, 2022), Vol. 04, No. 01.

<sup>8</sup>Ita Rosita dan Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak, “Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai”, (Riau: Jurnal Niara, 2022), Vol. 14, No. 3, hlm. 263.

produk yang masih belum menarik pasca mengikuti pelatihan.<sup>9</sup> Binaan yang merasakan hambatan-hambatan tersebut cenderung bersikap ketergantungan terhadap program, yang berakhir tidak menerima manfaat setelah mengikuti program. Sedangkan binaan yang berhasil mandiri dengan mengikuti dan mengimplementasi seluruh pelatihan yang diperoleh selama mengikuti program, dapat memperoleh manfaat positif terhadap kehidupannya, yaitu peningkatan kualitas hidup.

Peningkatan kualitas hidup ini merupakan salah satu bagian dari indikator keberhasilan dalam program Jak Preneur, yang diantaranya dapat dilihat dari; peningkatan pengetahuan dan keterampilan binaan, peningkatan kesejahteraan hidup, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam perekonomian.<sup>10</sup> Melalui indikator keberhasilan tersebut, dapat membantu dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kekurangan program. Kemudian, informasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan, serta perbaikan program Jak Preneur kedepannya. Selain itu, manfaat yang telah dirasakan binaan, juga dapat membangkitkan minat dan kepercayaan pelaku UMKM DKJ, yang sebelumnya tidak mengetahui lebih lanjut mengenai program Jak Preneur.

*Intelligentia - Dignitas*

<sup>9</sup>Muhammad Sulistyono, Yusuf Hidayat, dan Muhammad Riduansyah Syafari, “*Strategi of Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSMEs) Food Sector by The office Cooperatives, Small/Micro Business and Industry of Balangan Regency*”(United State: *International Journal of Political, Law, and Social Science*, 2022), Vol. 3, No.1, hlm. 115.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan staf Sudin PPKUKM psk Andre pada 4 September 2024 pukul 12.07 WIB

## 1.2 Rumusan Masalah

Program Jakarta Entrepreneur (Jak Preneur) telah menjadi andalan Pemprov DKI dalam rangka meningkatkan kelas UMKM. Melalui program Jak Preneur, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki persiapan dalam membuka usaha dapat memiliki keberanian lebih untuk mulai menjejakkan kaki di dunia usaha. Program Jak Preneur membantu para binaan yang sebelumnya kesulitan dalam membuka usaha, mengurus perizinan, sertifikasi halal, dan permodalan dengan pembinaan yang dilakukan secara terstruktur. Di tengah teknologi yang semakin maju, program Jak Preneur berkomitmen dalam mengembangkan UMKM yang dituntut untuk dapat terus berinovasi, baik dalam produksi maupun pemasaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Pembinaan dan pelatihan yang dibuat juga turut dilakukan dengan memanfaatkan digitalisasi, hal ini dilakukan agar para binaan dapat beradaptasi di era modern saat ini.

Sebuah program pemberdayaan UMKM pasti bertujuan untuk membawa perubahan di dalamnya. Dengan berbagai manfaat yang diberikan program Jak Preneur dalam menaikkan kelas UMKM di Jakarta, hasil yang diperoleh para binaan dapat menjadi bentuk penilaian program. Apakah program Jak Preneur ini memberikan dampak positif atau justru negatif. Seperti adanya perubahan yang terjadi pada kehidupan binaan sebelum dan sesudah mengikuti program Jak Preneur. Sejauh mana bentuk perubahan tersebut dapat menjadi penilaian apakah program ini berhasil mencapai tujuannya dalam menaikkan kelas UMKM, serta menjadi evaluasi jika tidak memberikan banyak perubahan bagi para binaan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengembangan UMKM yang dilakukan dalam program Jak Preneur?
2. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program Jak Preneur di Kecamatan Cipayung?
3. Bagaimana manfaat program Jak Preneur dalam meningkatkan kualitas hidup berdasarkan perspektif *Entrepreneurship* Schumpeter?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengembangan UMKM yang dilakukan dalam program Jak Preneur.
2. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program Jak Preneur di Kecamatan Cipayung.
3. Untuk manfaat program Jak Preneur dalam meningkatkan kualitas hidup berdasarkan perspektif *Entrepreneurship* Schumpeter.

*Intelligentia - Dignitas*

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademik

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada kajian sosiologi Ekonomi terkhusus dalam program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
2. Studi ini juga diharapkan dapat menjelaskan kepada pembaca mengenai program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemprov Daerah Khusus Jakarta dan mempelajari pemanfaatan kegiatan dalam meningkatkan kelas UMKM.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemprov Daerah Khusus Jakarta : Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur jalannya program pemberdayaan UMKM yang dijalankan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) dan dapat menjadi bahan masukkan untuk evaluasi program Jak Preneur dan program pemberdayaan UMKM selanjutnya.
2. Bagi masyarakat : Penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengenal program pemberdayaan yang diselenggarakan Pemprov Daerah Khusus Jakarta dan pemanfaatan sebagai peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi peneliti berikutnya : Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rekomendasi bagi penelitian sejenis yang juga memiliki fokus

kajian pada program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemprov Daerah Khusus Jakarta.

### 1.5 Tinjauan Literatur

Sebagai penyelenggara pembangunan ekonomi, negara harus membuat upaya yang terencana, terprogram sistematis, dan berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat. Sistem ekonomi kerakyatan yang selalu ditegaskan dalam pemerintahan Indonesia memiliki tujuan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar pelaku ekonomi, termasuk dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana pemerintah menciptakan sebuah kebijakan berupa program yang bertujuan dalam pemberdayaan UMKM. Lebih jauh penelitian ini membahas bagaimana program yang diciptakan tersebut mampu membawa perubahan dalam bidang sosial-ekonomi di kehidupan pelaku UMKM, sebagai peserta dalam program pemberdayaan.

Penelitian-penelitian mengenai program pemberdayaan UMKM ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, kajian yang lebih memfokuskan peran dan aktor dalam pemberdayaan, yang mana setiap aktor memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam mengimplementasikan program pemberdayaan UMKM.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hasan Ismail, *Studi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro*, (Surabaya : Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara, 2022), 6(1); Syamsyari, dkk, *Selecting Priority Policy Strategies for Sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises in Takalar Regency*, (Basel : MDPI : *Journal Sustainability*, 2022), Vol.14; Joseph Crawford, dkk, *Government finance, loans, and guarantees for small and medium enterprises (SMEs) (2000–2021): A systematic review*, (Tasmania : *Journal Of Small Business Management*, 2023); Tendai Chikweche & Alessandro Bressan, *An investigation on the need for business advisors who can respond to the changing needs of small business enterprises faced with*

Berdasarkan studi-studi tersebut, aktor pemberdayaan UMKM terdiri dari; Pemerintah, yang berperan dalam merancang kebijakan, memberikan bantuan alat produksi, bantuan perizinan, dan memberikan bantuan pinjaman modal serta jaminan melalui bank pemerintah. Dimana lembaga keuangan berperan dalam memberikan kemudahan untuk mengakses pinjaman tersebut. Selanjutnya komunitas atau non pemerintahan, berperan dalam memberikan pelatihan dan pendidikan terkait pengembangan UMKM. Pelatihan dan pendidikan tersebut tentunya didampingi oleh pendamping yang selain mendampingi juga berperan dalam memberikan konsultasi bisnis. Terakhir, setelah semua stakeholder menjalankan perannya, pelaku UMKM dapat berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kedua, kajian yang lebih memfokuskan fungsi dan manfaat dari adanya program pemberdayaan UMKM.<sup>12</sup> Meskipun program pemberdayaan UMKM dalam studi-studi tersebut berbeda-beda, namun fungsi dan manfaat yang dihasilkan dapat ditarik persamaan yaitu, bermanfaat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kemiskinan. Ketiga, penelitian yang melihat efektivitas jalannya

---

*a dynamic operating environment*, (Sidney : *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 2020); Bambang Irawan, dkk, *Empowering Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) to Improve Global Economic Welfare*, (Ponorogo : EDUJAVARE PUBLISHING, 2023), 1(2).

<sup>12</sup> Rena Natalia, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kerja Branding UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Pelaku UMKM Desa Kweden*, (Surabaya : ABIMANYU: *Journal of Community Engagement*, 2023), 3(2); Arieska Kurnia Wilyawati, dkk, *Pemberdayaan Pelaku UMKM Melalui Komunitas Langkah Berdikari Untuk Pengembangan UMKM di Desa Karangturi, Karanganyar*, (Surakarta : *East Journal of Innovative Community Services*, 2022), 1(1); Noni Rozaini & Aulia Nurfitriana, *Pengaruh Dana Bansos Umkm Terhadap Peningkatan Perekonomian dalam Masyarakat di Kota Medan*, (Medan : *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2023) 1(3); Nursini, *Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia*, (Makassar : *Development Studies Research*, 2020); Alifah Fidela, dkk, *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang*, (Bogor : *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2020), 2(3); Tulus Tambunan, *SME development, economic growth, and government intervention in a developing country: The Indonesian story*, (Jakarta Barat : *Journal of International Entrepreneurship*, 2008).

program pemberdayaan UMKM, yang dinilai sudah tepat sasaran dengan menjangkau segala usia, dan berjalan sesuai dengan kebutuhan seperti; pemberian izin, hak merek, sertifikasi halal, BPOM, pembuatan desain logo, dan fasilitas pemasaran. Dimana dalam penyelenggaraan program terdapat kekurangan yang perlu dievaluasi untuk pencapaian program yang lebih baik, yaitu; branding program yang kurang maksimal, masih terdapat UMKM yang belum mandiri dan ketergantungan, serta minimnya minat anak muda.<sup>13</sup> Efektivitas program pemberdayaan UMKM juga tidak terlepas dari adanya hambatan dan tantangan di dalamnya. Hambatan ini mencakup; SDM yang tidak kompeten, manajemen yang kurang profesional, kurangnya sosialisasi dan komunikasi, keterbatasan modal, kualitas produk yang tidak memenuhi persyaratan, ketidaksesuaian harga, dan kemasan produk yang masih belum menarik pasca mengikuti pelatihan. Sedangkan tantangan yang terdapat dalam jalannya program pemberdayaan UMKM yaitu; pengurangan anggaran, keterbatasan modal, kurangnya motivasi pelaku UMKM, dan persaingan usaha.<sup>14</sup>

Penelitian-penelitian mengenai program pemberdayaan UMKM sebelumnya belum ada yang menjelaskan lebih detail mengenai perubahan yang

---

<sup>13</sup> Ainaa & Novie, Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jak Preneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara, (Bandung : Neo Republica : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2023), 5(1); Ita Rosita & Harapan Tua Ricky, Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, (Riau : Jurnal Niara, 2022), 14(3); Bishnu Kumar Adhikary, dkk, *Does the government credit guarantee promote micro, small, and medium enterprises? Evidence from Indonesia*, (Kobe : *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 2019).

<sup>14</sup> Anna Elisabeth Panjaitan, dkk, *The Implementation of Jakarta Entrepreneurship (Jak Preneur) Program in Empowering Small and Medium Enterprises in Kembangan District Administrative City of West Jakarta*, (Jakarta : *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 2022), 4(1); Muhammad Sulistyono, dkk, *Strategi of Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSMEs) Food Sector by The office Cooperatives, Small/Micro Business and Industry of Balangan Regency*, (Banjarmasin : *International Journal of Political, Law, and Social Science*, 2022), 3(1).

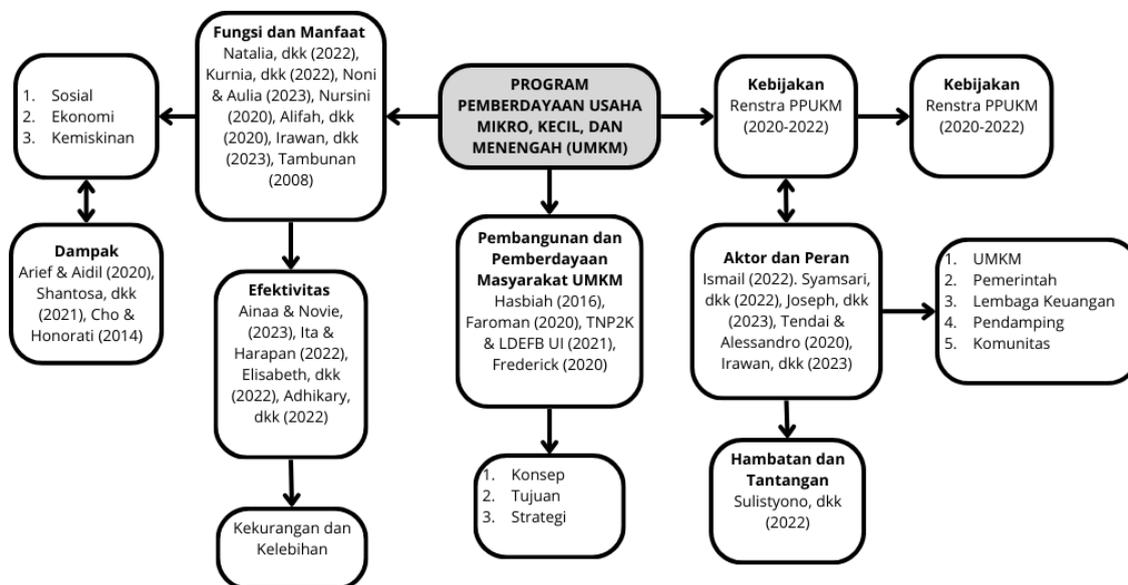
dihasilkan dari adanya program pemberdayaan. Meskipun dari penelitian mengenai dampak program menunjukkan jika program pemberdayaan berdampak pada perubahan bidang sosial dan ekonomi, namun tidak ada yang menjelaskan secara rinci seperti apa perubahan tersebut, dan hanya berupa kesimpulan data analisis.<sup>15</sup> Terlebih dalam penelitian mengenai program Jakarta *Entrepreneur* (Jak Preneur), belum ada yang mengkaji mengenai evaluasi program Jak Preneur dengan menggunakan evaluasi *Linking to planning (Mean-End Analysis)* dan konsep *Entrepreneurship* Schumpeter. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perubahan sosial-ekonomi dalam kehidupan pelaku UMKM pasca bergabung dalam program pemberdayaan Jakarta *Entrepreneur* (Jak Preneur) di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Penulis melibatkan 5 pelaku UMKM sebagai informan dalam penelitian sebagai perbandingan dan beberapa informan selaku pendamping. Penelitian ini juga akan melihat keberhasilan dari program tersebut, apakah lebih banyak peserta yang berhasil mandiri atau gagal setelah mengikuti berbagai pelatihan, bantuan, dan pendampingan.

*Intelligentia - Dignitas*

---

<sup>15</sup> Arief Budiyanto & Aidil Amin Effendy, Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Memberdayakan Peranan UMKM dan Koperasi Terhadap Perekonomian Kota Tangerang Selatan, (Jakarta : Jurnal Mandiri, 2020) 4(1); Santhosh Shetty, dkk, *impact of entrepreneurship development programmes on economic aspects of trainees: Evidence from training centres in India*, (India : *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 2021); Yoon Young Cho & Maddalena Honorati, *Entrepreneurship programs in developing countries: A meta regression analysis*, (Amsterdam : *Labour Economics Journal*, 2014).

**Skema 1.1**  
**Tinjauan Literatur Sejenis**



Sumber : Hasil Analisa Peneliti, 2024

## 1.6 Kerangka Konseptual

### 1.6.1 *Entrepreneurship* Joseph Schumpeter

Dalam dekade terakhir, *entrepreneurship* semakin meningkat terutama dalam bidang pendidikan bisnis dan lembaga-lembaga masyarakat yang kemudian menciptakan misi pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia sendiri istilah *entrepreneurship* terus mengalami perkembangan, yang mana pada masa awal kemerdekaan, *entrepreneurship* lebih dikenal sebagai berdikari atau yang berarti kewirausahaan.<sup>16</sup> Namun terlepas dari itu, program pendidikan dan pelatihan *entrepreneurship* banyak diselenggarakan secara informal dan dalam berdurasi

<sup>16</sup> Margo Purnomo, *Perspektif Definisi Entrepreneurship*, (Bandung : Jurnal Bisnis Indonesia, 2010), Vol. 1, No. 2, hlm. 66

singkat hingga menjangkau wilayah pedesaan. *entrepreneurship* sendiri telah menjadi topik yang sangat menarik. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan akibat krisis, inisiatif dari pemerintah, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan kewirausahaan, baik karena alasan pribadi maupun karena masyarakat menyadari manfaatnya dalam mendukung ladang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Kemampuan *entrepreneurship* seseorang erat kaitannya dengan unsur kreativitas, inovasi dan keberanian mereka dalam mengambil risiko. Sikap dan mental yang kuat menjadi pondasi utama dalam meraih keberhasilan sebagai seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur akan dituntut memiliki pola pikir kreatif, yaitu mampu menciptakan hal-hal baru yang unik dan berbeda dari yang sudah ada, serta memiliki nilai tambah. Selain itu, ide-ide kreatif tersebut juga perlu diwujudkan dalam tindakan yang nyata secara inovatif, serta disertai keberanian dalam mengambil risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya.<sup>17</sup> Oleh karena itu, mental yang tangguh, tidak mudah menyerah dalam menghadapi kegagalan, dan sikap positif terhadap kepercayaan diri sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar sangat diperlukan bagi seorang entrepreneur.

*Entrepreneurship* sebagai topik yang menarik juga telah menyita perhatian sosiologis, yang kemudian dikaitkan dengan setidaknya tiga tema besar dalam teori dan penelitian terkini. Pertama, *entrepreneurship* dapat mereproduksi dan menantang tatanan sosial yang ada. Yang mana Stinchcombe, salah satu sosiolog berpendapat bahwa seseorang membangun organisasi yang tertanam secara

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 67

budaya dan spesifik secara historis, dan mencerminkan kondisi masyarakat pada suatu konjungtur historis tertentu. Dalam hal ini masyarakat dicirikan oleh distribusi pendapatan, kekayaan, kekuasaan politik, dan sumber daya lainnya. Kedua, *entrepreneurship* memastikan reproduksi populasi organisasi yang ada dan meletakkan dasar bagi terciptanya populasi baru. Hal ini diartikan bahwa meskipun organisasi terus didirikan, kebanyakan hanya merupakan versi baru atau penyesuaian dari bentuk organisasi yang sudah ada, bukan dari inovasi yang sepenuhnya baru dalam lanskap organisasi secara keseluruhan. ketiga, *entrepreneurship* mempengaruhi tingkat stratifikasi dan ketidaksetaraan dalam masyarakat dengan membentuk peluang hidup para pendiri dan karyawannya. Pendirian dan pembubaran organisasi ini menghasilkan banyak sekali volatilitas lapangan kerja melalui penciptaan atau penghancuran lapangan pekerjaan.<sup>18</sup>

Dalam memahami lebih dalam mengenai *entrepreneurship*, dalam penelitian ini saya menggunakan gagasan dari Joseph Schumpeter mengenai *entrepreneurship*. Joseph Schumpeter seorang ekonom sekaligus ahli teori sosial mengemukakan bahwa beberapa orang memiliki kapasitas untuk menjadi seorang entrepreneur, sedangkan yang lainnya tidak. Schumpeter dalam konsep *entrepreneurship* ini mengaitkan kekuatan kepemimpinan yang hampir super kepada seorang entrepreneur. Namun dalam bukunya yang lain, Schumpeter juga memfokuskan perhatiannya pada fungsi dari *entrepreneurship*, bukan orang yang melaksanakannya. Selain itu, Schumpeter juga berpendapat bahwa *entrepreneurship* harus ditempatkan dalam konteks sosial dan historisnya.

---

<sup>18</sup> Neil J. Smelser dan Richard Swedberg, *The Handbook Of Economic Sociology*, (New York, Princeton University Press, 2005), hlm. 451

Menurutnya tidak seorang pun menjadi *entrepreneurship* selamanya, tapi hanya ketika benar-benar melakukan aktivitas inovatif.<sup>19</sup> Schumpeter menyatakan bahwa seorang entrepreneur memainkan peran kunci dalam menghasilkan inovasi dengan menggabungkan faktor produksi seperti teknologi dan teknik.

Pandangan Schumpeter tersebut juga dapat diterapkan dalam konteks ekonomi Indonesia, yang salah satunya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan menguraikan kontribusi inovasi dan peran entrepreneur dalam pertumbuhan ekonomi, Schumpeter menegaskan bahwa kunci utama perkembangan ekonomi terletak pada sosok inovator dan pelaku usaha. Menurutnya, kemajuan ekonomi dalam suatu masyarakat hanya dapat tercapai apabila terdapat inovasi yang diinisiasi oleh para entrepreneur. Dalam teori *entrepreneurship* yang dikemukakannya, Schumpeter memandang seorang entrepreneur sebagai tokoh sentral dalam proses inovasi, sementara *entrepreneurship* itu sendiri dianggap sebagai kekuatan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi melalui proses yang disebutnya sebagai *creative destruction* atau penghancuran kreatif, yakni ketika inovasi menggantikan sistem atau produk lama dengan yang lebih baru dan efisien. Schumpeter menekankan bahwa pertumbuhan output ekonomi yang signifikan hanya dapat tercapai melalui terjadinya transformasi inovatif yang dipimpin oleh pengusaha.<sup>20</sup>

Dalam teorinya, Schumpeter turut menekankan peran penting dari kredit dan modal dalam membiayai inovasi. Bank dan lembaga keuangan sangat penting dalam menyediakan pendanaan yang diperlukan bagi wirausaha untuk melakukan

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 454-455

<sup>20</sup> Karol Sledzik, *Schumpeter View on Innovation and Entrepreneurship*, (Poland: University of Gdańsk, 2013), hlm. 90-92

usaha baru yang seringkali berisiko. Schumpeter memandang bahwa pembangunan ekonomi merupakan siklus dengan periode inovasi cepat yang mengarah pada ledakan ekonomi dan diikuti oleh stagnasi atau bahkan resesi ekonomi. Yang mana saat inovasi tersebut melambat dan pasar menyesuaikan, maka siklus-siklus tersebut akan terputus dan tersegmentasi.

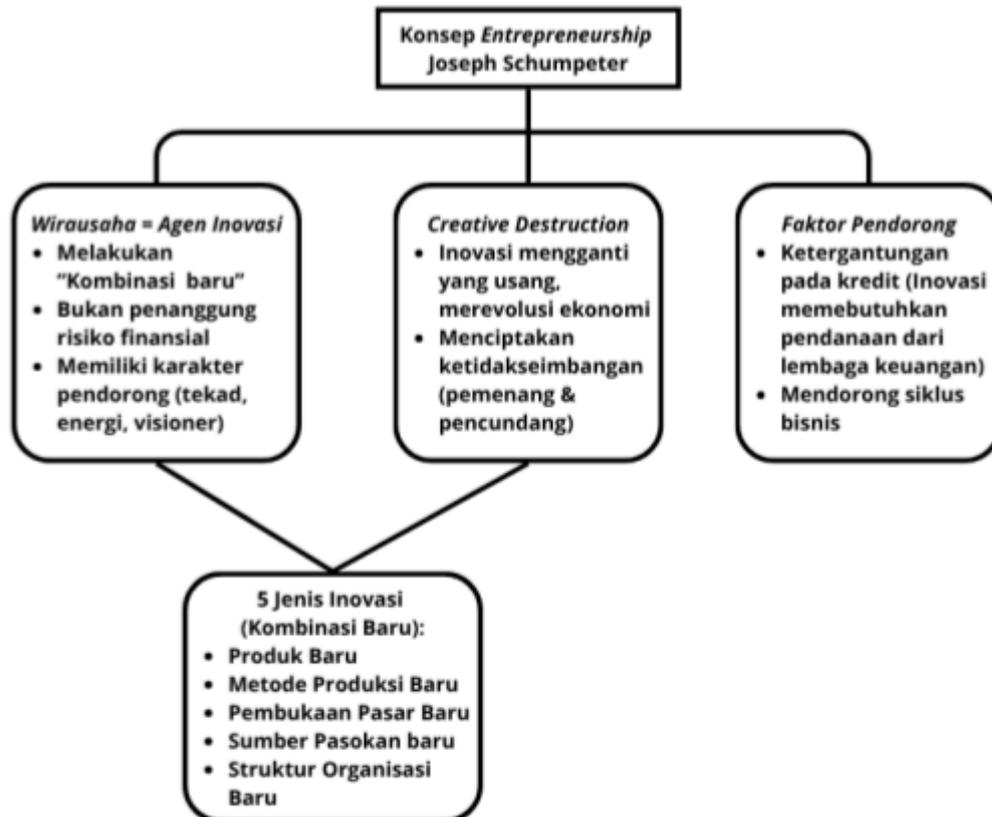
Schumpeter juga menyatakan bahwa entrepreneur menciptakan kombinasi baru melalui pengembangan produk baru, metode produksi baru, eksplorasi pasar yang belum tergarap, pemanfaatan sumber daya yang belum dimanfaatkan sebelumnya, serta penerapan struktur organisasi yang inovatif.<sup>21</sup> Schumpeter meyakini bahwa dorongan utama seorang wirausahawan adalah keinginan untuk memperoleh pengaruh atau kekuasaan, yang diwujudkan melalui kemampuan mereka dalam menghadapi tekanan sosial dan mengatasi keterbatasan yang ada. Karena itulah, Schumpeter dikenal luas sebagai tokoh yang menempatkan peran inovatif entrepreneur sebagai elemen sentral dalam perubahan dan dinamika ekonomi. Untuk melihat gambaran lebih jelas mengenai *entrepreneurship* menurut Schumpeter maka dapat dilihat dalam bagan berikut;

*Intelligentia - Dignitas*

---

<sup>21</sup> Neil J. Smelser dan Richard Swedberg, *Op.Cit*, hlm. 455

## Skema 1.2

Konsep *Entrepreneurship* Joseph Schumpeter

Sumber: Hasil Interpretasi Penulis, 2025

### 1.6.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam penyelenggaraan ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, fungsi, dan potensi yang cukup strategis dalam mewujudkan struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, di Indonesia terbentuklah Undang-Undang No.9 Tahun 1999 yang kemudian berkembang dan berubah menjadi Undang-undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM). Pada peraturan tersebut, UMKM didefinisikan

sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Definisi ini turut diikuti kriteria dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut.

Menurut pasal 6, kriteria UMKM dapat terlihat dalam bentuk permodalan, yaitu sebagai berikut;

1. Usaha dapat dikategorikan sebagai Usaha Mikro jika memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) angka tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, Usaha Mikro paling tidak memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha dapat dikategorikan sebagai Usaha Kecil jika memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) atau paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Selain itu, Usaha Kecil paling tidak memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Selanjutnya, usaha dapat dikategorikan sebagai Usaha Menengah jika memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Paling tidak usaha ini juga

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).<sup>22</sup>

Jika dilihat dari kenyataan UMKM di Indonesia, masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa mencapai kriteria tersebut. Menurut Paramatiha, hal ini dikarenakan UMKM di Indonesia memiliki ciri khas tertentu, seperti; mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar; banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar; status usaha milik pribadi atau keluarga; sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya yang direkrut melalui pola pemagangan; pola kerja seringkali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya; memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana; struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja; izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi untuk mendukung UMKM.<sup>23</sup> Merujuk pada penelitian ini, diperlukan pemberdayaan bagi para pelaku UMKM yang setidaknya dapat mendorong UMKM agar mampu memenuhi kriteria sesuai dengan perundang-undangan UMKM yang ditetapkan pemerintah.

Selain Undang-undang No 20 Tahun 2008, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu sebagai berikut; Usaha Mikro memiliki jumlah tenaga kerja 1-5 orang; Usaha Kecil memiliki

---

<sup>22</sup>Faroman Syarif, *Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, (Makassar: Yayasan Barcode, 2020) hlm. 15.

<sup>23</sup> Mukti Fajar, *UMKM dan Globalisasi Ekonomi*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm. 92.

jumlah tenaga kerja mulai dari 5-19 orang; dan Usaha Menengah dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang.<sup>24</sup> Sedangkan dalam pandangan usaha, UMKM dapat diklasifikasikan sebagai empat kelompok, yaitu;

1. UMKM sektor formal, contohnya seperti pedagang kaki lima.
2. UMKM mikro, yaitu para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Usaha kecil dinamis, yaitu kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan subkontrak) dan ekspor.
4. *Fast moving enterprise*, yaitu UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.<sup>25</sup>

Di Indonesia, kelompok UMKM sektor formal dan UMKM mikro merupakan kelompok yang perlu lebih diperhatikan agar mampu mempertahankan usahanya di tengah berbagai ancaman atau ketidakpastian usaha.

Jika di Indonesia UMKM diklasifikasikan sebagai empat kelompok. Uni Eropa memiliki definisi berbeda mengenai UMKM atau *Small to Medium Enterprises (SME)*, yaitu; *Small to Medium Enterprises is a business with a headcount of fewer than 250 is classified as medium-sized; a business with a headcount of fewer than 50 is classified as small, and a business with a headcount of fewer than 10 is considered a micro business. The European system also takes into account a business's turnover rate and its balance sheet.* Dalam

---

<sup>24</sup> Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat dan Lembaga Demografi FEB UI, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan, 2021), hlm 22.

<sup>25</sup> Lathifah Hanum dan Noorman, *UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2018), hlm. 29.

penjelasannya, bisnis yang memiliki jumlah pekerja kurang dari 250 orang diklasifikasikan sebagai bisnis yang berukuran medium. Sedangkan bisnis yang memiliki jumlah pekerja kurang dari 50 disebut sebagai bisnis berukuran kecil, dan apabila kurang dari 10 maka disebut dengan bisnis mikro. Selain itu pada sistem Uni Eropa juga memperhitungkan *turnover rate* dari bisnis dan juga balance sheet-nya sebagai salah satu acuan dalam mengklasifikasikan jenis bisnis-bisnis tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan jika UMKM merupakan sebuah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang berukuran kecil dengan kategori yang didasarkan pada pendapatan per-tahun, jumlah kekayaan, serta kuantitas jumlah tenaga kerja.

### **1.6.3 Evaluasi *Linking to Planning (Means-Ends Analysis)***

Setiap upaya pembangunan, evaluasi menjadi elemen penting untuk penting untuk menilai efektivitas dan dampak dari suatu program atau kebijakan. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami apakah tujuan pembangunan telah tercapai serta bagaimana intervensi yang dilakukan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan evaluasi yang tepat, pelaksana program dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai capaian yang telah diraih maupun tantangan yang masih dihadapi. Tantangan utama dalam banyak evaluasi program pembangunan adalah mengidentifikasi dan menilai perubahan dalam kondisi kehidupan masyarakat yang sesuai dengan cakupan program yang sedang dievaluasi, serta

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar, *op.cit* hlm 97.

menentukan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Pada proses ini mencakup penelusuran tentang sejauh mana perubahan itu telah berlangsung, dengan beberapa karakteristik perubahan, yaitu: 1) diciptakan langsung oleh program atau proyek yang dievaluasi; 2) dihasilkan secara tidak langsung sebagai dampak dari program atau proyek; 3) berasal dari atau dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di luar cakupan program atau proyek.<sup>27</sup>

Dalam menelusuri dan menentukan perubahan situasi kehidupan masyarakat, tentu melibatkan analisis struktur sebab-akibat dan perubahan struktur tersebut dari waktu ke waktu. Evaluasi ini untuk membuktikan dan menjelaskan perubahan cenderung lebih besar pada tingkat perubahan dampak, dengan menilai perubahan yang terjadi dari implementasi program. Reidar Dale menjelaskan jika fokus utama evaluasi dapat digambarkan oleh hubungan antara variabel-variabel inti evaluasi, yaitu efisiensi, efektivitas, relevansi, dampak, dan keberlanjutan. Dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Efisiensi, mengacu pada hubungan antara jumlah serta mutu output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan. Total biaya output dihitung sebagai akumulasi dari biaya seluruh input yang dipakai untuk memproduksi output tersebut.
2. Efektivitas, menggambarkan sejauh mana output yang direncanakan, hasil yang diharapkan, dan dampak yang diinginkan dapat benar-benar tercapai.

---

<sup>27</sup> Reidar Dale, "Evaluating Development Programmes and Projects" Second Edition, (New Delhi: Sage Publication, 2004) Hal. 105

3. Relevansi, mengevaluasi seberapa jauh suatu program atau proyek berhasil memprioritaskan masalah yang ada, terutama dari sudut pandang para pemangku kepentingan, khususnya pihak penerima manfaat.
4. Dampak, biasanya bersifat jangka panjang, berupa konsekuensi tidak langsung dan luas dari pelaksanaan program atau proyek, sebagaimana dirasakan oleh penerima manfaat. Dampak ini dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada sudut pandang penilaiannya.
5. Keberlanjutan, berkaitan dengan upaya mempertahankan atau memperkuat perubahan positif yang telah dicapai oleh program atau proyek setelah masa intervensi resmi berakhir. Melalui tindakan keberlanjutan, diharapkan hasil dari program atau proyek dapat terus dilanjutkan, baik oleh organisasi pelaksana awal maupun oleh pihak lain.<sup>28</sup>

Variabel atau karakteristik tersebut dapat menjadi indikator penilaian evaluasi program atau proyek pembangunan, seperti program Jak Preneur yang merupakan program pemberdayaan UMKM di Jakarta. Program Jak Preneur sendiri memiliki indikator keberhasilan yaitu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, peningkatan kesejahteraan hidup peserta, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam perekonomian. Untuk dapat melihat hasil dari program Jak Preneur dan melihat bagaimana program dalam mencapai tujuannya, penulis juga menggunakan evaluasi *linking to planning (means-ends analysis)* dari Reidar Dale. Evaluasi ini menekankan bahwa perencanaan dan evaluasi adalah dua cara yang berbeda dalam melihat isu yang sama. Tantangan utama bagi

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm 105-111

perencana pembangunan adalah menganalisis dan merumuskan hubungan sarana-tujuan, hubungan ini berkaitan dengan bagaimana sumber daya dan kegiatan (sarana) akan menghasilkan perubahan yang diinginkan (tujuan) dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, perencanaan merujuk pada suatu tujuan, sedangkan evaluasi menyatakan pencapaian-pencapaian yang harus didokumentasikan atau dijelaskan. Pada perencanaan, terdapat tujuan pembangunan (*development objective*), tujuan dampak (*effect objectives*), tujuan langsung (*immediate objectives*), dan hasil yang diharapkan (*intended outputs*). Sedangkan pada evaluasi, pencapaian dapat dilihat dari *input*, *implementation*, *output*, perubahan langsung (*direct changes*), efek (*effect*), dan dampak (*impact*) dari program. Dengan penjelasan sebagai berikut;

1. *Input*, merupakan alokasi sumber daya yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
2. *Output*, merupakan hasil langsung dari pelaksanaan suatu program.
3. *Effect*, merupakan manfaat yang terwujud.
4. *Impact*, merujuk pada hasil dari capaian tujuan pembangunan,
5. *Direct Changes*, merupakan perubahan langsung yang berhubungan dengan tujuan langsung yang merupakan pencapaian dalam bentuk yang lebih langsung. Namun secara harfiah perubahan ini mungkin tetap memerlukan waktu untuk dapat terwujud, dan perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm 52-56

#### 1.6.4 Hubungan Antar Konsep

Beberapa konsep telah dijabarkan mulai dari konsep *entrepreneurship*, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Evaluasi Program Pembangunan. Konsep-konsep tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam penelitian ini. Program Jakarta Entrepreneur (Jak Preneur) merupakan sebuah inisiatif pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui pendekatan *entrepreneurship*. Pendekatan ini digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan seperti kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil risiko pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

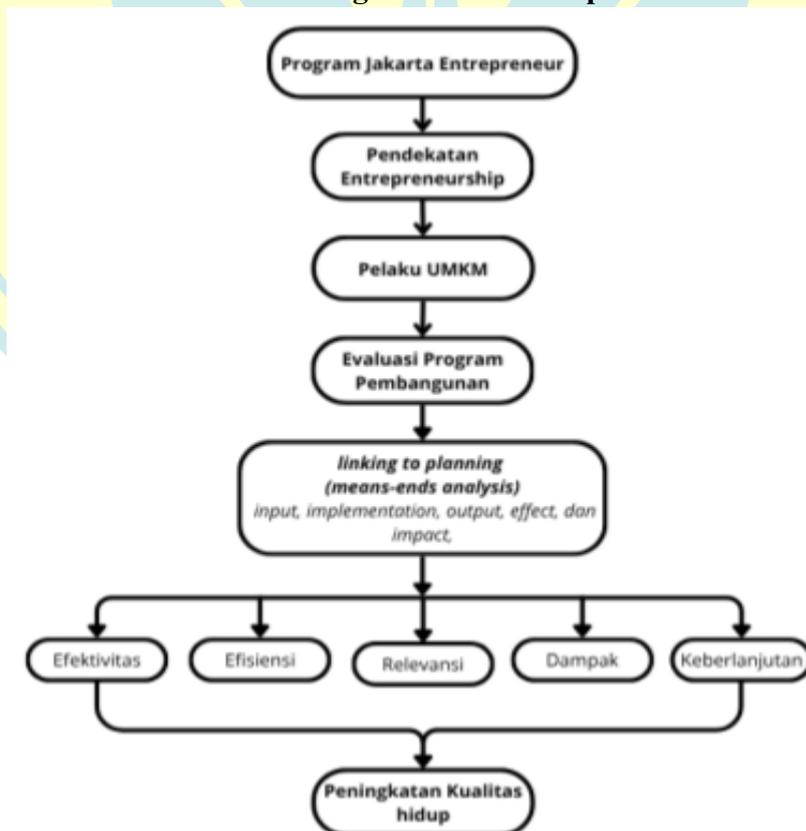
Melalui pendekatan tersebut, pelaku UMKM diberikan berbagai bentuk pembinaan seperti pelatihan keterampilan usaha, fasilitasi legalisasi, akses permodalan, hingga dukungan pemasaran. Pelaku UMKM kemudian menjadi subjek utama dalam proses penguatan kapasitas ekonomi berbasis kewirausahaan ini. Selanjutnya, program ini dievaluasi menggunakan kerangka Evaluasi Program Pembangunan, yang mencakup lima dimensi utama, yaitu:

1. Efektivitas: sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi: bagaimana penggunaan sumber daya (waktu, modal, tenaga) dalam pelaksanaan program.
3. Relevansi: kesesuaian antara program dengan kebutuhan pelaku UMKM.
4. Dampak: perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan pelaku UMKM.

5. Keberlanjutan: potensi program untuk terus memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Kelima dimensi evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan evaluasi *linking to planning (means-ends analysis)* dengan melihat *input, implementation, output, effect, dan impact*, untuk kemudian menilai hasil program terhadap peningkatan kualitas hidup pelaku UMKM. Kualitas hidup dalam konteks ini mencakup aspek ekonomi (peningkatan pendapatan, kestabilan usaha), sosial (kepercayaan diri, jejaring sosial), dan profesional (kemampuan manajerial dan adaptasi terhadap pasar).

**Skema 1.3**  
**Hubungan Antar Konsep**



Sumber: Hasil Interpretasi Penulis, 2025

## 1.7 Metodologi Penelitian

### 1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah orang atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi dalam pendekatan kualitatif peneliti melakukan penelaahan mendalam terhadap suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau individu (baik satu maupun lebih). Kasus yang diteliti memiliki batasan waktu dan aktivitas tertentu, sehingga peneliti perlu mengumpulkan data secara rinci dengan berbagai teknik pengumpulan data selama jangka waktu tertentu.<sup>30</sup> Menurut Neuman, penelitian studi kasus menyelidiki secara intensif satu atau sekumpulan kecil kasus, dengan fokus pada banyak detail dalam setiap kasus dan konteksnya. Singkatnya, penelitian ini meneliti detail fitur internal setiap kasus serta situasi di sekitarnya.<sup>31</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan mengumpulkan data secara mendalam mengenai fenomena atau permasalahan yang ada. Data yang dihasilkan akan dibuat suatu laporan studi kasus secara menyeluruh sehingga menjadi satu penelitian yang relevan.

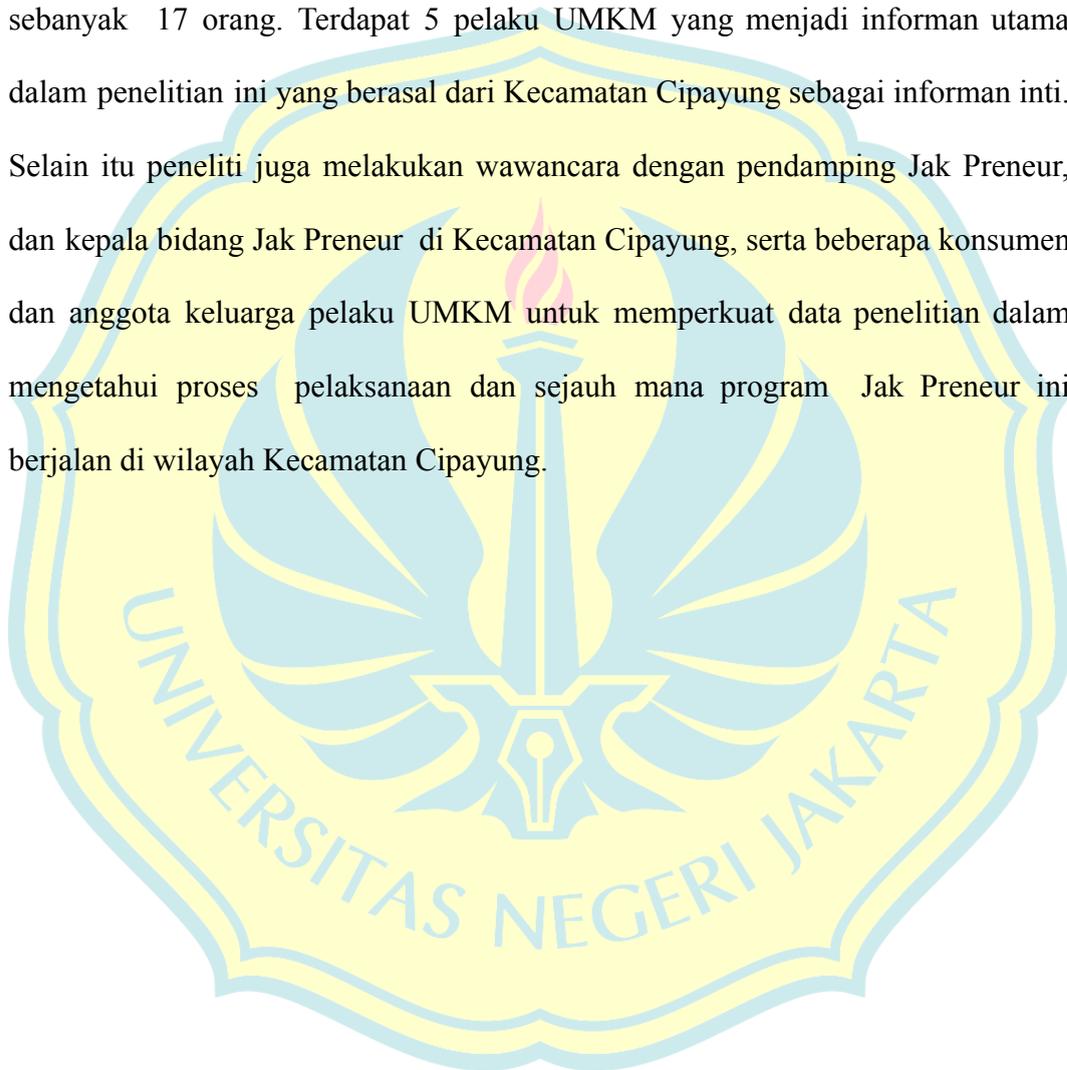
---

<sup>30</sup> John Ward Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 287.

<sup>31</sup> William Lawrence Neuman, *Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches, Seventh Edition*, (Edinburgh : Pearson Education Limited, 2014), hlm. 42

### 1.7.2 Subjek Penelitian

Saat ini jumlah peserta yang bergabung di program Jak Preneur sebanyak 380.266 pelaku UMKM. Namun peneliti hanya menentukan subjek penelitian sebanyak 17 orang. Terdapat 5 pelaku UMKM yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yang berasal dari Kecamatan Cipayung sebagai informan inti. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pendamping Jak Preneur, dan kepala bidang Jak Preneur di Kecamatan Cipayung, serta beberapa konsumen dan anggota keluarga pelaku UMKM untuk memperkuat data penelitian dalam mengetahui proses pelaksanaan dan sejauh mana program Jak Preneur ini berjalan di wilayah Kecamatan Cipayung.



*Intelligentia - Dignitas*

**Tabel 1.2**  
**Karakteristik Subjek Penelitian**

<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	<b>Posisi Subjek Penelitian</b>	<b>Informan</b>	<b>Cakupan Isi Data</b>
Wawancara Mendalam	Lima peserta program Jak Preneur di Kecamatan Cipayung	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hendro</li> <li>● Mardiyah</li> <li>● Nani</li> <li>● Meri</li> <li>● Ani</li> </ul>	Sejarah usaha dan latar belakang mengikuti program Jak Preneur, manfaat mengikuti program Jak Preneur (Efektivitas, relevansi, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan), peran aktor, dan evaluasi program
	Satu orang pendamping peserta Jak Preneur di Kecamatan Cipayung	Devi Puspitasari	Latar belakang menjadi pendamping binaan UMKM Jak Preneur, hubungan dengan binaan UMKM Jak Preneur, dukungan dan bantuan yang diberikan, dan pemantauan perkembangan binaan.
	Staff Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Andre Rivaldi	Strategi dalam mengidentifikasi UMKM berpotensi, proses pengembangan UMKM dalam program Jak Preneur, pemantauan perkembangan UMKM dalam program Jak Preneur, peran aktor dalam program Jak Preneur, keberhasilan program Jak Preneur, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, dan evaluasi dan harapan pendamping. Data jumlah UMKM Jakarta Timur
	Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Renni</li> <li>● Titin Fatimah</li> <li>● Sinda</li> <li>● Mamah Rohimah</li> <li>● Mira</li> <li>● Sulastri</li> </ul>	Pengalaman belanja, akses dan informasi, kualitas produk, inovasi, dan pelayanan dari UMKM binaan.
	Keluarga binaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Moko</li> <li>● Suphian</li> <li>● Amalia</li> <li>● Midah</li> </ul>	Konfirmasi perubahan sosial dan ekonomi UMKM Binaan.

Sumber : Olah data Peneliti, 2024

### **1.7.3 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tepatnya di sekitar kelurahan Lubang Buaya dan Pinang Ranti. Selain itu penelitian ini akan dilakukan di kantor Kecamatan Cipayung yang berlokasi di Jl. Bina Marga No.26, RT.6/RW.2, Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Mengingat segala kegiatan program Jak Preneur berpusat di kantor kecamatan. Untuk pelaksanaan penelitian, penelitian dimulai sejak Juni 2024 sampai dengan Februari 2025.

### **1.7.4 Peran Peneliti**

Peran peneliti adalah sebagai orang yang meneliti atau pengamat penelitian. Peneliti berusaha mencari informasi mengenai dampak pelaksanaan program UMKM Jakarta Entrepreneur (Jak Preneur) yaitu peningkatan kualitas hidup pelaku UMKM di Kecamatan Cipayung pasca mengikuti program. Dalam memperoleh data secara menyeluruh, peneliti terjun langsung kelapangan dengan melakukan pengamatan pada event-event UMKM yang dilaksanakan di Kecamatan Cipayung, mengunjungi tempat usaha beberapa informan, serta melakukan kunjungan ke kantor Kecamatan Cipayung untuk memperoleh penyempurnaan data. Sehingga dalam kegiatan tersebut, peneliti dapat melihat, menafsirkan, dan menganalisis kegiatan mereka untuk data penelitian.

### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian

kualitatif merupakan observasi yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dengan tujuan mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.<sup>32</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan datang langsung ke kantor Jak Preneur, untuk memperoleh data penyelenggaraan program Jak Preneur di Kecamatan Cipayung. Selain itu, peneliti menghadiri event pemasaran seperti bazar yang diselenggarakan Jak Preneur di Kecamatan Cipayung. Peneliti mengobservasi aktivitas dan keterampilan binaan Jak Preneur dalam pemasaran produk.

Teknik pengumpulan data selanjutnya yang digunakan adalah melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara semi-struktur, di mana selain pertanyaan yang telah disiapkan pada pedoman wawancara, peneliti juga akan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan jawaban dari informan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung atau *face to face* pada informan-informan terkait. Selain menyiapkan instrumen sebagai pedoman wawancara, dalam pengumpulan data peneliti juga menggunakan alat pendukung seperti; perekam suara dan video, gambar, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara berjalan lancar.<sup>33</sup> Alat pendukung tersebut akan membantu dalam proses dokumentasi dalam memperoleh data. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sejak Juli 2024 - September 2024.

---

<sup>32</sup> John Ward Creswell, *Op. Cit*, hlm. 224

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 275

### 1.7.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen, peneliti akan menyaring temuan yang paling sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka teori yang relevan.

### 1.7.7 Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>34</sup> Dengan teknik triangulasi, peneliti melakukan proses pengambilan data sekaligus melakukan pengujian kredibilitas data dari berbagai sumber. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Triangulasi terdiri dari dua jenis yaitu, triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi sumber adalah Sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kedua teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara mendalam dengan melibatkan beberapa informan kunci, yaitu pelaku UMKM atau anggota binaan Jak Preneur kecamatan Cipayung untuk memperoleh informasi seputar sejarah usaha, manfaat

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 241

<sup>35</sup> Ibid, hlm, 241

yang diperoleh, peran aktor, dan evaluasi, serta wawancara dengan staf dinas PPKUKM untuk mengetahui strategi identifikasi UMKM potensial, peran, pemantauan perkembangan, dan data jumlah UMKM kecamatan di Jakarta Timur. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi dilakukan melalui observasi lapangan dengan mengunjungi langsung lokasi pelatihan dan tempat usaha anggota binaan, serta studi dokumentasi. Peneliti juga turut melakukan wawancara dengan pihak pendamping binaan di kecamatan Cipayung dan beberapa konsumen, untuk dapat memperkuat analisis mengenai perubahan sosial-ekonomi dari pelaku UMKM melalui program Jak Preneur.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Ketiga bagian ini akan dijabarkan dalam lima bab, yakni satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan, dan satu bab penutup.

**Bab I** : Pada bab ini berisi uraian pendahuluan dengan penjabaran latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian.

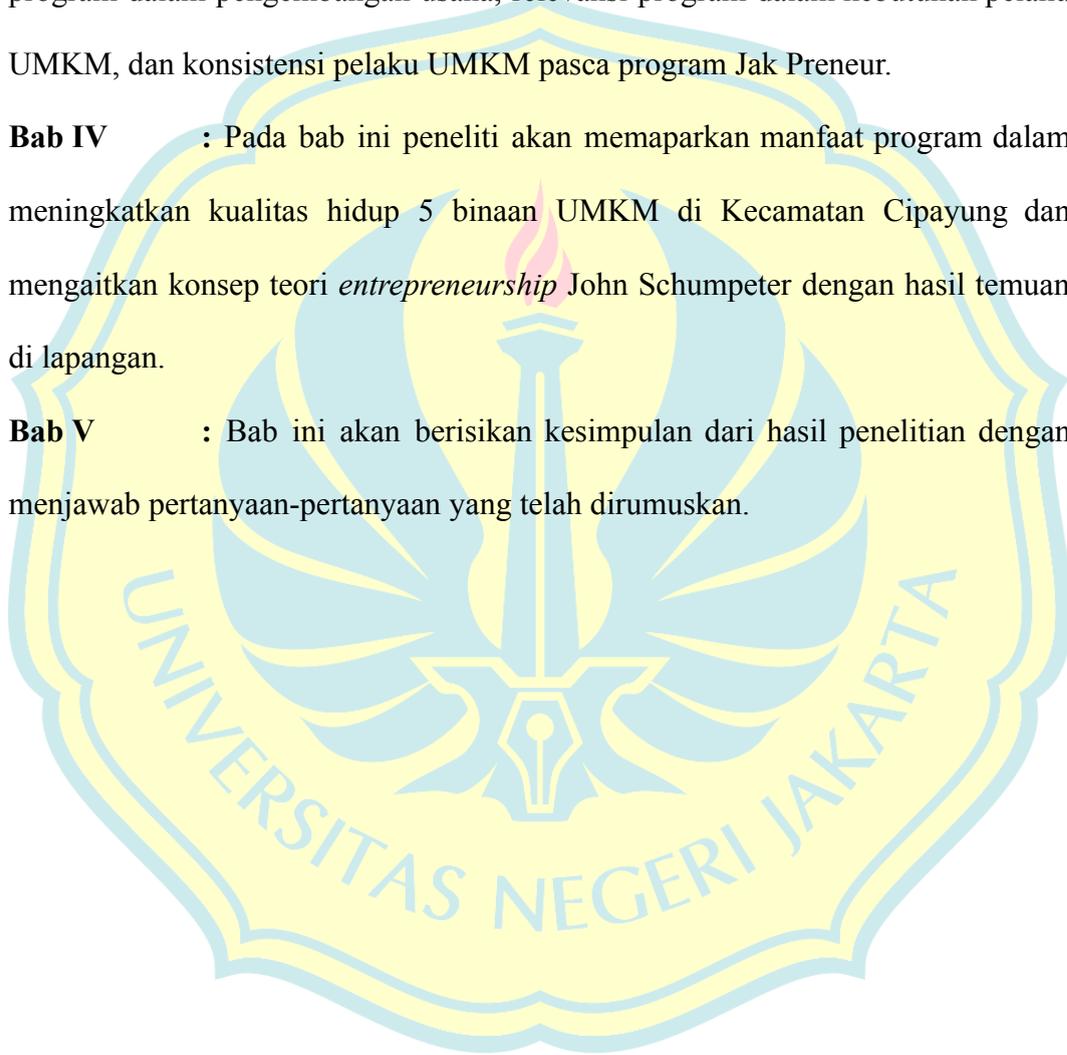
**Bab II** : Bab ini berisikan profil program dan gambaran umum penyelenggaraan program Jakarta Entrepreneur (Jak Preneur) di Kecamatan Cipayung.

**Bab III** : Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan terkait aspek-aspek perubahan pasca mengikuti

program Jakarta Entrepreneur (Jak Preneur) dalam evaluasi program *Linking to Planning (Means-end Analysis)* untuk melihat; efektivitas program dalam meningkatkan pengetahuan, dampak program dalam jaringan kolaborasi, efisiensi program dalam pengembangan usaha, relevansi program dalam kebutuhan pelaku UMKM, dan konsistensi pelaku UMKM pasca program Jak Preneur.

**Bab IV** : Pada bab ini peneliti akan memaparkan manfaat program dalam meningkatkan kualitas hidup 5 binaan UMKM di Kecamatan Cipayung dan mengaitkan konsep teori *entrepreneurship* John Schumpeter dengan hasil temuan di lapangan.

**Bab V** : Bab ini akan berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan.



*Intelligentia - Dignitas*